Krepa: Kreativitas Pada Abdimas
ISSN 2988-3059
Cahaya Ilmu Bangsa

Vol 7 No 5 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.9765/Krepa.V218.3784

BAHASA ISYARAT SEBAGAI AKSES KOMUNIKASI INKLUSIF BAGI KESEJAHTERAAN KOMUNITAS TULI DI KOTA PALEMBANG

Masya Hanifah[1], Isnawijayani[2]
[1-2] Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bina Darma
Email: masyahanifah2003@gmail.com

ABSTRACT

Equal access to communication is a fundamental requirement for achieving social well-being among the Deaf community in Palembang. Sign language, as a visual-gestural linguistic system, serves a strategic function in ensuring access to information, expanding opportunities for social participation, and strengthening cultural identity within the Deaf community. This study aims to analyze the role of sign language in supporting inclusive communication, identify barriers to accessing public communication, and examine the contribution of Deaf community organizations in promoting social well-being. A descriptive qualitative approach was applied, employing participatory observation, documentation, and literature review techniques. The findings indicate that the use of Indonesian Sign Language in organizational activities, public services, and official forums helps reduce communication barriers between Deaf and hearing communities and improves inclusive communication literacy. However, major challenges persist, including limited availability of sign language interpreters, low sign language literacy in society, and inadequate accessible information media. These findings align with the principles of Inclusive Communication Theory, Information Accessibility Theory, and Social Participation Theory, which emphasize that linguistic access is essential for equitable involvement in social processes. Therefore, sign language functions not only as a communication medium but also as an instrument for advancing social inclusion and the well-being of the Deaf community at the local level.

Keywords: *Sign Language, Inclusive Communication, Deaf Community, Palembang City*

ABSTRAK

Akses komunikasi yang setara merupakan prasyarat bagi terwujudnya kesejahteraan sosial komunitas Tuli di Kota Palembang. Bahasa isyarat sebagai sistem bahasa visual-gestural memiliki peran penting dalam menjamin keterjangkauan informasi, memperluas ruang partisipasi sosial, dan memperkuat identitas budaya komunitas Tuli. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran bahasa isyarat dalam mendukung komunikasi inklusif, mengidentifikasi hambatan akses komunikasi publik yang

Article History
Received: November 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Plagiarism Checker No 234.KK.443
Prefix DOI :
10.9765/Krepa.V218.3784

Copyright : Author
Publish by : Krepa

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

ISSN 2988-3059 **Prefix DOI : 10.9765/Krepa.V218.3784**
Cahaya Ilmu Bangsa

dialami komunitas Tuli, serta menelaah kontribusi komunitas Tuli dalam meningkatkan kesejahteraan sosial melalui aktivitas komunitas. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik observasi partisipatif, dokumentasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Bahasa Isyarat Indonesia dalam kegiatan organisasi, layanan publik, dan forum resmi mampu menurunkan hambatan komunikasi antara komunitas Tuli dan masyarakat dengar serta meningkatkan literasi komunikasi inklusif. Namun demikian, keterbatasan penerjemah, rendahnya literasi bahasa isyarat di masyarakat, dan minimnya media informasi aksesibel masih menjadi hambatan utama. Temuan penelitian ini selaras dengan Teori Komunikasi Inklusif, Teori Aksesibilitas Informasi, dan Teori Partisipasi Sosial yang menekankan pentingnya akses bahasa dalam menjamin keterlibatan setara dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, bahasa isyarat tidak hanya menjadi medium komunikasi, tetapi juga instrumen penting bagi inklusi dan peningkatan kesejahteraan sosial komunitas Tuli di tingkat lokal.
Kata Kunci : Bahasa Isyarat, Komunikasi Inklusif, Komunitas Tuli, Kota Palembang

PENDAHULUAN

Komunikasi merupakan kebutuhan fundamental yang memungkinkan individu berinteraksi, membangun relasi sosial, serta berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui proses komunikasi yang efektif, informasi dapat disampaikan secara tepat, pemahaman dapat dibangun, dan keterlibatan sosial dapat ditingkatkan. Dalam kerangka pembangunan inklusif, komunikasi yang setara menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya pemenuhan hak asasi manusia dan kesetaraan kesempatan bagi seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas rungu. Kementerian Sosial Republik Indonesia (2023) menegaskan bahwa komunikasi inklusif harus menjamin akses dan ruang partisipasi yang setara tanpa diskriminasi akibat perbedaan kemampuan fisik maupun bahasa. Dengan demikian, pemenuhan akses komunikasi yang adaptif melalui penyediaan bahasa isyarat, teknologi pendukung, maupun kebijakan layanan publik merupakan langkah strategis untuk menghilangkan hambatan struktural yang selama ini membatasi penerimaan informasi dan partisipasi sosial komunitas Tuli dalam ruang publik.

Bagi komunitas Tuli, Bahasa isyarat bukan sekadar medium penyampaian pesan tetapi merupakan fondasi utama keterhubungan sosial. Supena (2019) menjelaskan bahwa bahasa isyarat merupakan bahasa alami yang memiliki tata bahasa dan sistem makna mandiri, sehingga kedudukannya setara dengan bahasa lisan. Dengan demikian, penggunaan bahasa isyarat membuka akses komunikasi yang setara dalam interaksi sosial maupun institusional. Lebih jauh, Ladd (2021) menegaskan bahwa bahasa isyarat berperan penting dalam membangun identitas kolektif, rasa memiliki, dan kepercayaan diri komunitas Tuli, yang menjadi prasyarat bagi peningkatan partisipasi dan keterlibatan sosial. Dengan kata lain, pengakuan dan pemenuhan hak penggunaan bahasa isyarat tidak hanya berdampak pada aspek linguistik, tetapi juga menentukan kesejahteraan psikososial dan peningkatan kualitas hidup penyandang disabilitas rungu dalam masyarakat inklusif.

Namun demikian, dalam praktik sehari-hari, penggunaan bahasa isyarat masih belum terintegrasi secara luas dalam sistem komunikasi masyarakat umum. Rendahnya literasi bahasa isyarat di berbagai lapisan masyarakat, keterbatasan jumlah juru bahasa isyarat profesional, serta belum memadainya penyediaan informasi dalam format visual-gestural menyebabkan kesenjangan komunikasi yang signifikan antara komunitas Tuli dan masyarakat dengar. Ketidaksetaraan akses informasi ini berdampak pada terbatasnya kesempatan komunitas Tuli dalam memperoleh layanan publik, mengikuti proses pendidikan, menerima layanan kesehatan, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan pengambilan keputusan di ruang publik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hambatan struktural dan kultural dalam komunikasi masih menghalangi terwujudnya komunikasi inklusif, sehingga upaya penguatan akses bahasa isyarat perlu dilakukan secara sistematis melalui kebijakan, peningkatan kompetensi masyarakat, dan penyediaan layanan komunikasi yang aksesibel.

Di tingkat lokal, Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (GERKATIN) Palembang hadir sebagai organisasi yang secara aktif memperjuangkan pemenuhan hak komunikasi komunitas Tuli melalui pelatihan bahasa isyarat, sosialisasi publik, dan pendampingan komunitas, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menegaskan hak penyandang disabilitas untuk memperoleh akses informasi, layanan publik yang inklusif, serta kesempatan yang setara dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan kondisi tersebut, kajian mengenai peran bahasa isyarat sebagai akses komunikasi inklusif bagi komunitas Tuli di Kota Palembang menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran bahasa isyarat dalam mendukung terwujudnya komunikasi inklusif, mengidentifikasi hambatan komunikasi yang masih dihadapi komunitas Tuli, serta mengkaji kontribusi Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (GERKATIN) Palembang dalam memperluas akses komunikasi sebagai upaya peningkatan kesejahteraan sosial komunitas Tuli di tingkat lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam peran bahasa isyarat sebagai akses komunikasi inklusif bagi komunitas Tuli di Kota Palembang. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi pengalaman, makna, dan praktik sosial yang dialami subjek penelitian secara kontekstual (Creswell & Poth, 2021). Informan penelitian ditentukan melalui teknik *purposive sampling* dengan kriteria keterlibatan langsung dalam kegiatan Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (GERKATIN) Palembang, yang meliputi anggota komunitas Tuli, pengurus organisasi, dan peserta pelatihan bahasa isyarat. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, dokumentasi kegiatan, dan studi literatur, sebagaimana dianjurkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2020) untuk memperoleh data kualitatif yang komprehensif. Data dianalisis secara deskriptif melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan guna menilai peran bahasa isyarat dalam mendukung komunikasi inklusif dan kesejahteraan sosial komunitas Tuli di tingkat lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Bahasa Isyarat dalam Mendukung Komunikasi Inklusif

Bahasa Isyarat Indonesia memiliki peran penting dalam mewujudkan komunikasi inklusif bagi komunitas Tuli di Kota Palembang. Posisi Bahasa Isyarat Indonesia sebagai fondasi utama komunikasi inklusif sejalan dengan pandangan Humphries (2023) yang menegaskan bahwa “pengakuan terhadap bahasa isyarat sebagai bahasa penuh merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya partisipasi sosial yang setara dan bermartabat bagi komunitas Tuli.” Kutipan ini

menegaskan bahwa bahasa isyarat tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian pesan, tetapi juga memiliki peran fundamental dalam membangun relasi sosial, menjamin akses partisipasi, serta mempertahankan identitas dan budaya komunitas Tuli. Dengan demikian, keberadaan Bahasa isyarat perlu dipahami sebagai bagian integral dari sistem komunikasi nasional yang menghargai keberagaman bahasa. Pengakuan dan penerapannya dalam ruang publik akan mendorong terciptanya inklusi sosial melalui akses informasi yang adil bagi seluruh warga negara, khususnya bagi individu Tuli yang selama ini sering terpinggirkan dalam proses komunikasi formal maupun informal.

Penggunaan Bahasa Isyarat Indonesia tidak hanya berlangsung dalam interaksi informal, tetapi juga diterapkan dalam kegiatan organisasi, sosialisasi publik, dan layanan administratif. World Federation of the Deaf (2023) menegaskan bahwa bahasa isyarat merupakan bahasa alami dengan tata bahasa dan aturan sendiri, sehingga memungkinkan penyampaian gagasan dan ekspresi emosional secara utuh. Temuan ini selaras dengan teori komunikasi inklusif yang dikemukakan oleh Booth dan Ainscow (2020), yang menyatakan bahwa komunikasi inklusif bertujuan menghilangkan hambatan bagi seluruh anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pertukaran informasi. Prinsip dasar teori tersebut menekankan bahwa akses informasi harus tersedia bagi seluruh individu tanpa memandang perbedaan kemampuan sensorik, sehingga keberadaan Bahasa Isyarat Indonesia menjadi instrumen komunikasi yang memastikan kesetaraan akses bagi penyandang disabilitas rungu. komunikasi inklusif tidak hanya berkaitan dengan penyediaan media komunikasi alternatif, tetapi juga menyangkut perubahan paradigma bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh informasi, berpartisipasi dalam dialog publik, dan menentukan keputusan secara mandiri dalam kehidupan sosial.

Bahasa Isyarat Indonesia mendukung prinsip keadilan komunikasi karena memastikan bahwa seluruh pesan, kebijakan, maupun informasi administratif dapat diterima secara akurat oleh penyandang disabilitas rungu. Melalui medium visual-gestural ini, individu Tuli memiliki akses langsung terhadap informasi publik tanpa harus bergantung pada penerjemah tidak profesional, sehingga memungkinkan komunikasi dua arah yang setara. Keberadaan bahasa isyarat dalam layanan publik, pendidikan, dan ruang sosial memperluas kemampuan komunitas Tuli untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, Komnas Perempuan (2024) dalam siaran persnya menyatakan bahwa, “bahasa isyarat tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi internal komunitas Tuli, tetapi juga menjembatani mereka dengan masyarakat luas, sehingga dapat terlibat secara signifikan dalam kehidupan sosial dan memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk perlindungan serta partisipasi setara.” Pernyataan ini menegaskan bahwa penggunaan bahasa isyarat tidak hanya meningkatkan kemandirian komunikasi, tetapi juga memperkuat penghormatan terhadap hak asasi, mengurangi marginalisasi informasi, serta memperkuat hubungan sosial antara komunitas Tuli dan masyarakat pada umumnya.

2. Hambatan Akses Komunikasi Publik bagi Komunitas Tuli

Akses komunikasi publik bagi komunitas Tuli di Kota Palembang masih menghadapi hambatan struktural maupun kultural yang berdampak pada kesenjangan informasi. Di tingkat nasional, data statistik terbaru menunjukkan bahwa jumlah penyandang disabilitas di Indonesia masih signifikan dan beragam, termasuk mereka yang mengalami gangguan pendengaran. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip Lestari Moerdijat pada 2025, tercatat lebih dari 17,8 juta warga Indonesia merupakan penyandang disabilitas, di mana sebagian besar berada dalam usia produktif namun masih menghadapi kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi akibat keterbatasan akses layanan, pendidikan, dan pekerjaan yang inklusif. Informasi yang disampaikan secara lisan tanpa pendampingan penerjemah bahasa isyarat menyebabkan

ISSN 2988-3059 **Prefix DOI : 10.9765/Krepa.V218.3784**
Cahaya Ilmu Bangsa

komunitas Tuli tidak mampu memahami pesan secara menyeluruh, terutama ketika informasi tersebut bersifat teknis, administratif, atau berkaitan dengan kepentingan sosial. Kondisi kurang optimalnya penyediaan layanan komunikasi inklusif terlihat jelas dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Palembang.

Pada banyak kesempatan, informasi penting terkait program pemerintah, prosedur administrasi kependudukan, serta sosialisasi kebijakan disampaikan secara lisan tanpa disertai penerjemah bahasa isyarat atau materi visual yang memadai. Di forum musyawarah tingkat kelurahan maupun kecamatan, penyampaian materi yang hanya menggunakan bahasa lisan atau tertulis membuat komunitas Tuli tidak dapat menerima informasi secara utuh dan mandiri. Hernández dan Barrenechea (2021) menegaskan bahwa, "aksesibilitas informasi merupakan hak dasar setiap warga dan menjadi prasyarat bagi partisipasi sosial yang setara, terutama bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas." Pernyataan tersebut sejalan dengan teori aksesibilitas informasi yang menekankan bahwa penyediaan informasi harus dapat diakses oleh semua individu tanpa hambatan, sehingga memungkinkan keterlibatan yang setara dalam proses sosial dan pengambilan keputusan publik. Dengan demikian, akses informasi berbasis bahasa isyarat menjadi bagian penting dalam menghilangkan kesenjangan komunikasi bagi komunitas Tuli.

3. Kontribusi Komunitas Tuli dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial

Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (GERKATIN) Palembang secara konsisten menerapkan Bahasa Isyarat Indonesia dalam seluruh aktivitas organisasi, meliputi forum diskusi, musyawarah internal, proses pengambilan keputusan, hingga interaksi keseharian anggota komunitas. Sejalan dengan teori partisipasi sosial, akses informasi dan komunikasi yang setara merupakan fondasi bagi keterlibatan bermakna dalam proses sosial. Smith dan Taylor (2023) menyatakan bahwa, "partisipasi sosial hanya dapat terwujud ketika individu memiliki kesempatan yang adil untuk mengakses informasi dan terlibat dalam proses komunikasi publik." Melalui penggunaan Bahasa Isyarat Indonesia, setiap anggota komunitas memperoleh kesempatan yang setara untuk menyampaikan pendapat, terlibat aktif dalam proses organisasi, serta berpartisipasi dalam dinamika sosial tanpa hambatan linguistik. Sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian komunikasi inklusif, penggunaan bahasa isyarat terbukti signifikan dalam memperkuat keterlibatan dan hubungan sosial antara individu Tuli dan lingkungan inklusif di sekitarnya, sehingga komunikasi tidak lagi menjadi penghalang partisipasi (Studi Komunikasi Inklusif, 2025)

Upaya memastikan akses penuh terhadap informasi publik menjadi bagian penting dari peran Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (GERKATIN) Palembang. Melalui fungsi advokasi dan dukungan sosial, organisasi ini menyediakan akses informasi bagi penyandang disabilitas rungu secara mandiri, tanpa ketergantungan pada pihak lain. Temuan penelitian mengenai dukungan sosial bagi komunitas Tuli menunjukkan bahwa kehadiran media dan layanan informasi yang aksesibel dapat meningkatkan kepercayaan diri dan partisipasi komunitas dalam ruang publik. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyediaan juru bahasa isyarat pada kegiatan publik, penyebaran informasi melalui media sosial berbahasa isyarat, serta perluasan kesempatan pembelajaran bahasa isyarat bagi masyarakat umum. Sejalan dengan itu, Garcia (2024) menyatakan bahwa, "akses informasi yang disediakan dalam format bahasa isyarat merupakan faktor kunci dalam meningkatkan partisipasi sosial dan kemampuan individu Tuli mengambil keputusan secara mandiri." Kutipan ini menegaskan bahwa akses informasi publik yang inklusif memegang peran penting dalam mengurangi ketimpangan komunikasi yang selama ini dialami komunitas Tuli.

ISSN 2988-3059 **Prefix DOI : 10.9765/Krepa.V218.3784**
Cahaya Ilmu Bangsa

Pertama, Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (GERKATIN) Palembang menyelenggarakan program pelatihan literasi bahasa isyarat dan komunikasi publik secara berkelanjutan sebagai bentuk penguatan kapasitas anggota komunitas Tuli dalam memahami dan menyampaikan informasi secara mandiri. Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi, memperluas akses interaksi sosial, serta membangun kepercayaan diri ketika berhadapan dengan masyarakat luas, termasuk lembaga pemerintah dan institusi layanan publik. Su et al. (2023) menegaskan bahwa, "penguasaan bahasa isyarat yang memadai meningkatkan kemandirian dan partisipasi sosial anggota komunitas Tuli dalam ruang publik." Melalui pelatihan tersebut, anggota komunitas Tuli memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif, sehingga mampu berpartisipasi lebih aktif dalam forum sosial dan pengambilan keputusan.

Kedua, Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (GERKATIN) Palembang secara konsisten secara aktif menyelenggarakan kegiatan sosialisasi mengenai urgensi penggunaan bahasa isyarat dalam berbagai konteks ruang publik sebagai bagian dari upaya memperluas akses komunikasi bagi komunitas Tuli. Kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan melalui pertemuan langsung dengan masyarakat dan pemangku kepentingan, serta melalui pemanfaatan media visual dan dokumentasi video berbahasa isyarat agar informasi dapat diterima secara lebih efektif. Pemanfaatan media digital memungkinkan anggota komunitas memperoleh informasi secara fleksibel, termasuk bagi mereka yang tidak dapat hadir secara langsung dalam kegiatan organisasi. Kuntz dan Morgan (2023) menyatakan bahwa, "penggunaan media digital berbasis bahasa isyarat dapat memperluas akses informasi dan memperkuat keterlibatan sosial komunitas Tuli dalam masyarakat." Strategi ini memperlihatkan komitmen GERKATIN dalam meningkatkan literasi bahasa isyarat di masyarakat, mendorong hubungan sosial yang setara, serta mengurangi kesenjangan linguistik antara komunitas Tuli dan masyarakat luas.

Ketiga, Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (GERKATIN) Palembang menerapkan strategi pendampingan komunitas melalui penyediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan publik, musyawarah, layanan sosial, serta konferensi pers. Kehadiran penerjemah memastikan bahwa informasi dapat diterima secara utuh tanpa kehilangan makna, sehingga anggota komunitas dapat berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan diskusi sosial. Rachmawati (2025) juga menambahkan bahwa, "juru bahasa isyarat memegang peran penting dalam membantu individu Tuli memperoleh informasi dan pengetahuan dalam berbagai bidang kehidupan, serta mengekspresikan gagasan dan perasaan yang tidak dapat disampaikan secara langsung tanpa pendampingan interpretatif." Dengan demikian, pendampingan komunitas melalui penerjemah bahasa isyarat berfungsi sebagai jembatan penting dalam mencegah marginalisasi linguistik dan menjamin kesetaraan akses informasi bagi penyandang disabilitas rungu.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahasa isyarat memiliki peranan sentral dalam mendukung komunikasi inklusif bagi komunitas Tuli di Kota Palembang. Bahasa Isyarat Indonesia berfungsi sebagai sistem komunikasi utama yang memungkinkan penyampaian informasi, gagasan, dan ekspresi emosional secara menyeluruh tanpa ketergantungan pada perantara pendengar. Keberadaan bahasa isyarat tidak hanya memfasilitasi pemahaman pesan, tetapi juga menjamin ruang partisipasi sosial yang setara dan menghormati martabat penyandang disabilitas rungu. Ketika bahasa isyarat digunakan secara konsisten dalam interaksi sosial dan pelayanan publik, mekanisme komunikasi menjadi lebih adil, tidak diskriminatif, serta mendukung prinsip kesetaraan dalam pengambilan keputusan sosial. Namun, temuan penelitian juga mengidentifikasi bahwa akses komunikasi publik bagi komunitas Tuli masih menghadapi berbagai

hambatan struktural dan kultural. Minimnya penyediaan juru bahasa isyarat dalam kegiatan pemerintahan, layanan administrasi, dan sosialisasi kebijakan menyebabkan informasi yang diterima tidak lengkap dan berpotensi menimbulkan kesalahan pemahaman. Hambatan tersebut diperburuk oleh rendahnya literasi bahasa isyarat di masyarakat dan belum optimalnya pemanfaatan media informasi visual yang aksesibel. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya partisipasi komunitas Tuli dalam proses sosial, termasuk keterlibatan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka.

Terlepas dari hambatan tersebut, kontribusi komunitas Tuli melalui peran komunitas seperti Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (GERKATIN) Palembang menunjukkan komitmen untuk mendorong terwujudnya komunikasi inklusif. Komunitas Tuli menyelenggarakan pelatihan literasi bahasa isyarat, melakukan sosialisasi di ruang publik, menyediakan juru bahasa isyarat dalam kegiatan resmi, dan melakukan advokasi pemenuhan hak komunikasi bagi penyandang disabilitas rungu. Inisiatif ini berimplikasi positif pada peningkatan kapasitas komunikasi anggota komunitas, memperkuat rasa percaya diri, serta memperluas kesempatan partisipasi dalam ruang sosial dan pelayanan publik. Upaya tersebut membuktikan bahwa akses bahasa isyarat yang memadai dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial melalui pengurangan marginalisasi linguistik dan perluasan partisipasi sosial yang setara. Penelitian ini menegaskan bahwa penyediaan akses bahasa isyarat merupakan prasyarat utama bagi terciptanya komunikasi inklusif yang adil, bermartabat, dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan komunikasi yang inklusif bagi komunitas Tuli, dibutuhkan kerja sama antara pemerintah, penyelenggara layanan publik, dan organisasi masyarakat. Pemerintah harus membuat kebijakan yang menjamin layanan publik dapat diakses dengan mudah, termasuk penggunaan bahasa isyarat di sekolah, layanan kesehatan, administrasi, dan forum masyarakat. Penyelenggara layanan publik perlu menyediakan sarana yang memudahkan komunikasi dua arah, seperti penerjemah bahasa isyarat profesional, materi informasi visual, dan media digital berbahasa isyarat.

DAFTAR PUSTAKA

Booth, T., & Ainscow, M. (2020). The index for inclusion: Developing learning and participation in schools. Bristol: Centre for Studies on Inclusive Education.

Hernández, M., & Barrenechea, M. (2021). Accessibility and social participation for persons with disabilities. Journal of Inclusive Communication Studies, 8(2), 115–129.

Humphries, T., Kushalnagar, P., Mathur, G., Napoli, D. J., Padden, C., Rathmann, C., Smith, S. R. (2022). Language access and Deaf participation in public life. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 27(3), 345–357.

Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2023*)*. Pedoman layanan komunikasi inklusif bagi penyandang disabilitas. Jakarta: Kementerian Sosial RI.

Ladd, P. (2003). Understanding Deaf culture: In search of Deafhood. Clevedon: Multilingual Matters.

Lane, H. (1992). The mask of benevolence: Disabling the Deaf community. New York: Alfred A. Knopf.

Marschark, M. (2022). Language, learning, and access for deaf individuals in inclusive educational settings. Oxford: Oxford University Press.

Nover, S. M., Christensen, K. M., & Lopez, S. (2023). Interpreting services and access equity for Deaf communities in public institutions. International Journal of Disability Studies, 14(2), 112–128.

Padden, C., & Humphries, T. (2005). Inside Deaf culture. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Perdana, A., & Yuniarti, S. (2021). Tantangan layanan juru bahasa isyarat pada pelayanan publik di Indonesia. Jurnal Pengabdian Masyarakat Inklusif, 6(2), 77–88.

Skutnabb-Kangas, T. (2012). Linguistic human rights for Deaf communities: Sign languages as minority or indigenous languages. International Journal of the Sociology of Language, 217, 155–178.

Supena, I. (2019). Bahasa isyarat dan penguatan identitas Tuli. Jakarta: Pusat Studi Disabilitas Indonesia.

U.S. Department of Justice. (2020). ADA requirements: Effective communication. Civil Rights Division.

UNESCO. (2018). Guidelines on inclusive communication. Paris: UNESCO Publishing.

World Federation of the Deaf. (2021). WFD position paper on sign language rights and accessibility. Helsinki: WFD Publications.

Yusuf, M., & Handayani, R. (2020). Implementasi komunikasi aksesibel dalam pelayanan administrasi publik bagi penyandang disabilitas rungu. Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan, 5(3), 215–230.